

BABI

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan, terdapat tiga lingkungan yang mempunyai peran strategis dalam membentuk kepribadian anak didik, yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari ketiga lingkungan tersebut, salah satu yang merupakan lingkungan atau lembaga dengan pengorganisasian yang tersusun secara rapi dan segala aktivitasnya direncanakan melalui penyusunan kurikulum adalah lingkungan sekolah.

Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan dengan kurikulum formal yang mempunyai tanggung jawab untuk terus mendidik siswanya selama masa pertumbuhan tertentu. Untuk itu sekolah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagai realisasi upaya kelembagaan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, 1992: 2). Di samping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan (Umaedi, 1999: 3).

Sekolah terdiri dari berbagai unsur, antara lain: pendidik, terdidik, sarana dan prasarana, kurikulum, pegawai Tata Usaha, peraturan/tata tertib. Unsur-unsur tersebut dalam prakteknya berinteraksi guna mencapai tujuan pendidikan yang

telah ditetapkan oleh sekolah. Interaksi yang paling nyata di sekolah adalah antara pendidik (guru) dan terdidik (siswa).

Peranan sekolah dalam perkembangan kepribadian anak didik melalui kurikulum, antara lain:

- a. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara pendidik dengan anak didik, dan antara anak didik dengan orang yang bukan pendidik (karyawan).
- b. Anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah.
- c. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara (Zahara Idris, 1988: 69).

Penciptaan lingkungan sekolah menjadi suasana yang kondusif ditentukan oleh banyak faktor, antara lain:

- a. Peran guru, siswa dan tenaga kependidikan serta masyarakat sekitar.
- b. Aspek-aspek pengelolaan lingkungan sekolah.
- c. Pendekatan dalam pengelolaan lingkungan sekolah (Im Wasliman, et al., 2001: 18-19).

Dari ketiga faktor di atas, peran guru sangatlah penting. Gurulah yang membimbing proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Setiap guru bukan hanya bertugas untuk mengajar, akan tetapi lebih dari itu ia sebagai pendidik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Basuki dan Ismail Arianto (2001: 18-19) bahwa:

Di lingkungan sekolah, guru mempunyai kedudukan yang sangat penting. Peserta didik sejak dari rumah sudah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan gurunya dan akan memperoleh pelajaran tertentu. Pada saat guru berdiri di depan kelas, semua mata tertuju kepadanya dan menantikan penjelasan apakah yang akan diberikan oleh guru. Sikap dan cara guru dalam menerangkan pelajaran menjadi perhatian peserta

didiknya. Oleh karena itu selama guru berada di kelas, pusat perhatian pada dasarnya adalah pada pelajaran dan kepada guru. Penilaian peserta didik kepada gurunya beragam, ada guru yang dianggap keras dan sangat tegas dalam bertindak, ada pula guru yang dipandang sangat toleran dan serba membolehkan. Perilaku guru akan memberi warna terhadap watak peserta didik.

Namun demikian, di samping peran guru, peran perangkat pendidikan yang lain dan peran orangtua siswa juga sangat mendukung bagi keberhasilan pendidikan di sekolah. Khusus bagi keberhasilan pendidikan budi pekerti, maka peran ketiganya sangatlah dominan dan sangat penting dalam membentuk dan membina anak didik ke arah budi pekerti yang baik.

Kerja sama guru, orangtua siswa, dan perangkat pendidikan lain dalam melaksanakan pendidikan budi pekerti tentu menuntut berbagai upaya atau usaha bagaimana supaya pendidikan budi pekerti tersebut dapat berhasil atau berdampak positif bagi perilaku para siswa sebagai generasi muda, sehingga dalam menjalani kehidupannya siswa-siswa tersebut dapat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat.

Guru di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan budi pekerti adalah Guru Pendidikan Agama, Guru PPKn, dan Guru Bahasa Indonesia, selain wali kelas. Ketiga guru ini harus bekerja sama secara terpadu dengan wali kelas dan orangtua siswa serta perangkat pendidikan lain dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pendidikan budi pekerti di sekolah.

Sementara itu, di sisi yang lain, mulai tahun ajaran 2001/2002, secara serempak dan simultan untuk semua kelas dan jenjang pendidikan, pemerintah Republik Indonesia, melalui Departemen Pendidikan Nasional telah

mengeluarkan suatu pedoman tentang pelaksanaan pendidikan budi pekerti yang penerapannya secara umum terintegrasi ke dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Depdiknas, 2001: 2).

Tujuan diterapkannya pendidikan budi pekerti yang terintegrasi secara umum itu adalah untuk memfasilitasi agar siswa mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai, mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri siswa serta mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari, dalam berbagai konteks sosial-budaya yang bhinneka (Depdiknas RI, 2001: 5-6).

Tujuan yang diharapkan di atas, pada kenyataannya memang masih jauh dari harapan dan sering menjadi masalah. Sebab banyak ditemukan perilaku-perilaku negatif/buruk yang dilakukan oleh para pelajar yang notabene mereka sudah pernah selesai di SD dan bersambung ke SLTP antara lain dalam belajar PPKn.

Pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, kebetulan SLTP Negeri 5 Tasikmalaya merupakan salah satu SLTP di Jawa Barat yang dijadikan sekolah uji coba dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti. Keputusan ini tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 2760/CY/PP/2001 tanggal 27 April 2001. Keputusan ini menjadi lebih penting dilihat dari amandemen ke-4 UUD negara kita oleh MPR, utamanya Pasal 31 ayat 3, yaitu sebagai berikut: "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu*

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Dengan bertitik tolak pada fenomena dan adanya surat keputusan di atas, maka menarik kiranya untuk dikaji secara lebih mendalam melalui sebuah penelitian, khususnya di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya, tentang peranan guru, orangtua siswa dan perangkat pendidikan lain pada keberhasilan pendidikan budi pekerti. Penentuan penelitian di SLTP ini didasarkan juga karena kebetulan penulis secara informal telah diharapkan oleh kepala sekolah melalui suatu wawancara awal tentang pentingnya penelitian ini di sekolah tersebut.

B. Perumusan Masalah

Banyak faktor yang terkait dan mempengaruhi keberhasilan upaya guru, orangtua siswa dan perangkat pendidikan lain pada keberhasilan pendidikan budi pekerti. Namun berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa di lingkungan sekolah masih banyak ditemukannya perilaku negatif siswa. Untuk menelaah upaya guru, orangtua dan perangkat pendidikan lain pada keberhasilan pendidikan budi pekerti di sekolah, khususnya pada tingkat SLTP, dapat dirumuskan dalam pertanyaan yang mendasar sebagai berikut: **“Bagaimana sumbangan faktor peranan guru, peranan orangtua siswa dan peranan perangkat pendidikan lain pada keberhasilan pendidikan budi pekerti?”**

C. Pertanyaan Penelitian

Sebagai kendali untuk sampai pada pokok persoalan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Bagaimana peranan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya?
2. Bagaimana peranan yang dilakukan orangtua siswa dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya?
3. Bagaimana peranan yang dilakukan perangkat pendidikan lain dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya?
4. Bagaimana tingkat keberhasilan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya setelah berlakunya ujicoba program pendidikan budi pekerti?
5. Bagaimana pengaruh peranan yang dilakukan guru terhadap pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya?
6. Bagaimana pengaruh peranan yang dilakukan orangtua siswa terhadap pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya?
7. Bagaimana pengaruh peranan yang dilakukan perangkat pendidikan lain terhadap pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

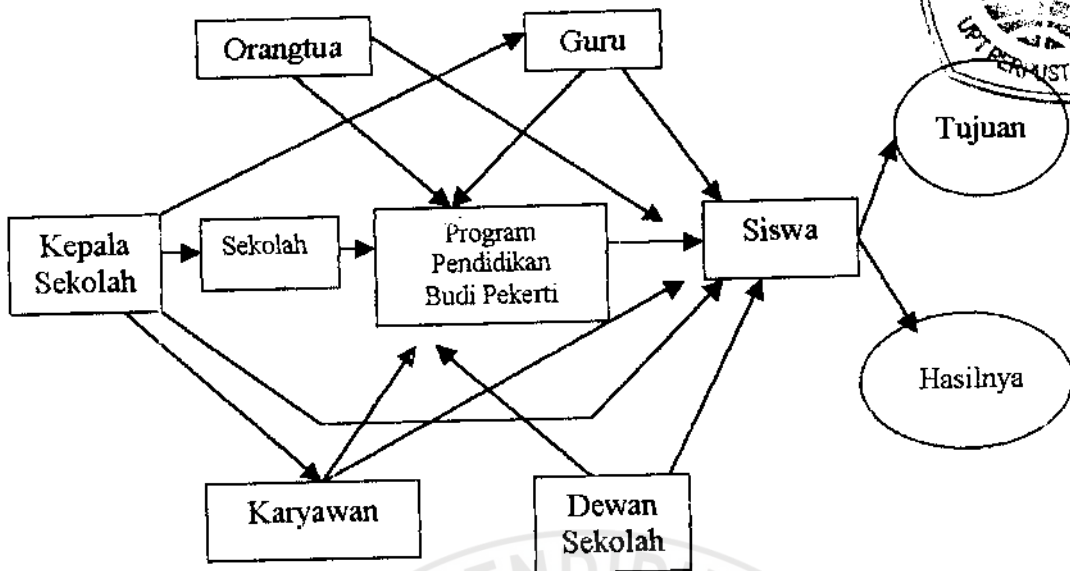
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peranan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya.

2. Mengetahui peranan yang dilakukan orangtua siswa dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya.
3. Mengetahui peranan yang dilakukan perangkat pendidikan lain dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya.
4. Mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya pasca berlakunya ujicoba pendidikan budi pekerti.
5. Mengetahui pengaruh peranan yang dilakukan guru terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya.
6. Mengetahui pengaruh peranan yang dilakukan orangtua siswa terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya.
7. Mengetahui pengaruh peranan yang dilakukan perangkat pendidikan lain terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan pendidikan budi pekerti di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya.

Di lingkungan sekolah, guru dan orangtua siswa serta perangkat pendidikan lain, seperti kepala sekolah, dewan sekolah, dan karyawan/Tata Usaha, sama-sama melaksanakan program pendidikan budi pekerti dengan tujuan untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia, sehingga hasilnya akan kelihatan secara nyata pada diri siswa ketika berada di sekolah dan di luar sekolah.

Untuk mengetahui kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 1 di bawah ini:



Bagan 1
Kerangka Pemikiran Penelitian

E. Asumsi

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Keberhasilan setiap proses pendidikan, termasuk pendidikan budi pekerti, sangat ditentukan oleh interaksi dan kerjasama yang terpadu antara guru, orangtua siswa dan perangkat pendidikan lain yang ada di sekolah yang bersangkutan.
2. Pengaruh guru sangat dominan dan strategis dalam mencapai keberhasilan pendidikan budi pekerti di sekolah.
3. Setiap manusia, termasuk anak didik, tentu mendambakan perilakunya terpuji dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu mereka berupaya semaksimal mungkin untuk membentuk dan membina kepribadian dirinya sendiri dengan cara terlibatnya mereka dalam mengikuti pendidikan budi pekerti di sekolah.

F. Definisi dan Penjelasan Variabel

1. Peranan

Peranan mempunyai arti lakon yang dimainkan oleh seorang pemain. Dalam penelitian ini peranan dimainkan oleh guru, orangtua siswa dan perangkat pendidikan lain.

2. Guru

Ada pendapat yang mengatakan: "Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah melakukan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orangtua." (Daradjat, et al., 1996: 39). Sejalan dengan pendapat tersebut, Dahlan (1982: 26) mengemukakan bahwa "Guru dapat sebagai sutradara sekaligus sebagai pemain dan penonton. Sebagai sutradara, guru hendaknya mampu menyusun skenario dan rencana yang akan dilaksanakan sendiri di saat bertugas. Sebagai pemain, guru berkewajiban melaksanakan rancangan yang telah dibuatnya, berinteraksi dalam situasi belajar mengajar. Sebagai penonton, guru berkewajiban mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa. Hampir sependangan dengan itu, Kosasih Djahiri (1985: 7-8) mengemukakan tentang peran guru yang mencakup 9 peran, yakni: guru sebagai perencana, guru sebagai pelaksana pengajaran/instruksional, guru sebagai fasilitator, guru sebagai administrator, guru sebagai evaluator, guru sebagai rewarder, guru sebagai manajer/pengelola kelas, guru sebagai pengarah/director, dan guru sebagai pemberi keputusan (decission maker). Dalam hal ini guru yang



dimaksud dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam, Guru PPKn, dan Guru Bahasa Indonesia yang ada di SLTP Negeri 5 Tasikmalaya.

3. Orangtua Siswa

Yang dimaksud orangtua siswa di sini adalah orangtua siswa SLTPN 5 Tasikmalaya yang mendidik dan mengasuh mereka dalam lingkungan keluarga. Orangtua ini dijadikan partner kerja guru dalam melaksanakan pendidikan budi pekerti di sekolah.

4. Perangkat Pendidikan Lain

Yang dimaksud perangkat pendidikan lain adalah subyek-subyek pendidikan yang berkaitan keberhasilan budi pekerti di sekolah, seperti: Kepala Sekolah, Pegawai Tata Usaha, dan Dewan Sekolah.

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki wewenang yang luas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Melalui inisiatif dan komunikasi yang lancar dengan guru dan tata usaha, kepala sekolah dapat mengembangkan kegiatan untuk meningkatkan proses belajar mengajar ataupun kegiatan lainnya yang memungkinkan peserta didik akan lebih banyak menarik manfaat bagi perkembangan intelektual maupun emosionalnya (Depdiknas RI, 2001: 16-17).

b. Pegawai Tata Usaha

Pegawai tata usaha sekolah mempunyai tanggung jawab dalam bidang administrasi sekolah, baik mengenai data tentang guru, peserta didik, perlengkapan atau peralatan sekolah, dan pelaksanaan kegiatan

administratif sekolah. Sehubungan dengan itu, pegawai tata usaha sekolah akan berhubungan dengan kepala sekolah, guru, peserta didik dan bahkan dengan dewan sekolah dan orangtua peserta didik.

c. Dewan Sekolah

Sebagai konsekuensi untuk mengakomodasi aspirasi, harapan dan kebutuhan stakeholders sekolah, maka perlu dikembangkan adanya wadah untuk menampung dan menyafurkannya yang diberi nama Dewan Sekolah.

Dewan sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Dewan sekolah terdiri dari unsur-unsur orangtua siswa, wakil siswa, wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat, wakil masyarakat terinstitusi, dan utusan pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan). Tujuan dari pembentukan dewan sekolah yaitu adanya suatu organisasi "Masyarakat Sekolah" yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas peserta didik (Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2001: 49-50).

5. Budi Pekerti

Budi pekerti diterjemahkan dari pengertian moralitas yang mengandung beberapa pengertian, antara lain adat istiadat, sopan santun dan perilaku. Oleh sebab itu pengertian budi pekerti yang paling hakiki adalah perilaku. Sebagai

perilaku maka budi pekerti meliputi sikap yang dicerminkan oleh perilaku (Edi Sedyawati, 1997: 4). Dalam pandangan Rahmat Djatnika (1985: 25), kata budi pekerti dalam bahasa Indonesia merupakan kata majemuk dari kata budi dan pekerti. Perkataan budi berasal dari bahasa Sanskerta, bentuk isim-fa'il atau alat, yang berarti yang sadar atau yang menyadarkan atau alat kesadaran. Bentuk mashdarnya adalah budh yang berarti kesadaran. Sedang bentuk maf'ulnya (obyek) adalah budha, artinya yang disadarkan. Pekerti berasal dari bahasa Indonesia sendiri, yang berarti kelakuan. Menurut terminologi, kata budi pekerti yang terdiri dari kata budi dan pekerti. Budi ialah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pemikiran, rasio, yang disebut karakter. Pekerti ialah apa yang terlihat pada manusia, karena didorong oleh perasaan hati, yang disebut behavior. Jadi budi pekerti adalah perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia.

Secara etika, budi pekerti merupakan perbuatan yang benar. Konsep ini mengandung arti suatu keharusan atau apa yang harus dilakukan. Keharusan akan berbuat benar ini sifatnya universal. Phenix (1964: 220) menyatakan bahwa *"the realm of ethics, then, is right action. The central concept in this domain is obligation or what ought to be done. The ought here is not individual but a universal principle of right."*

Bila dibandingkan dengan pemahaman budi pekerti secara estetis, maka itu akan berbeda. Perbuatan dalam estetis dibuat untuk tujuan-tujuan kontemplasi, sedangkan perbuatan etik dilakukan untuk tujuan-tujuan

partisipasi. Obyek estetik merupakan karya atau perbuatan individu yang unik dengan keunggulan intrinsik mereka sendiri, sedangkan perbuatan etik secara umum berkaitan dengan pemikiran-pemikiran untuk menunjukkan prinsip-prinsip kewajiban secara universal. Dalam estetik, perbuatan tersebut tidak ada pertanyaan harus tentang obyeknya, sedangkan dalam etik ada. Estetik tidak menuntut orang untuk bertanggung jawab terhadap karyanya, sementara perbuatan dalam etik justru menuntut orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Phenix (1964: 218) mengungkapkan:

Turning next to the esthetic realm, ethical meanings differ from esthetic ones in that the latter arise out of disinterested perception, while the former are concerned with active personal commitment. In the arts things are made for purposes of participation. Furthermore, esthetic objects are unique individual works with their own intrinsic excellence, while moral acts are generally thought to exemplify universal principles of obligation. In this respect ethical meanings are like the principles and generalizations of science.

Dalam makna estetis, keindahan bahasa merupakan suatu keharusan, sehingga bahasa yang santun adalah bahasa yang indah untuk didengar dan memberikan kepuasan sebagaimana fungsi bahasa dalam etis. Phenix (1964: 218) mengatakan bahwa "*ethical language, on the other hand, is used to alter feeling and behavior so as to produce the most harmonious satisfaction of desires and interests.*"

6. Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan budi pekerti adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku siswa yang memancarkan akhlak mulia. Menurut Udin S, et al. (2001: 7), secara kurikuler isi pendidikan budi pekerti pada dasarnya terdiri atas: 1) nilai-nilai esensial budi pekerti dan 2)

wahana pendidikan budi pekerti yang merupakan substansi dan proses pendidikan mata pelajaran yang relevan. Nilai-nilai esensial budi pekerti adalah sejumlah konsep dan perilaku yang secara substansif dinilai sebagai substansi utama budi pekerti.

6. Nilai

Dalam konteks penelitian ini nilai adalah standar suatu perilaku atau penghargaan yang menyebabkan hal itu pantas di-'kejar' oleh manusia demi peningkatan kualitas manusia atau pantas dicintai, dihormati, dikagumi, atau yang berguna untuk sesuatu tujuan (Mardiatmadja, 1986: 54). Sejalan dengan ini, Milton Rokeach (A. Kosasih Djahiri, 1991: 75) menyatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga, yang dianggap bernilai, adil, baik, benar dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri, berperilaku atau membandingkan diri dengan orang lain atau dengan standar. Nilai merupakan konsep etik. Konsep nilai berkaitan dengan kegunaan dalam melakukan suatu perbuatan. Ia merupakan konsep tentang yang benar. Phenix (1964: 218) mengungkapkan bahwa *"the value-concept truth is a gerundive, because it means "morthy of credence". Similarly, "excellent" and "beautiful" mean "wortly of admiration and "right" means "worthy of doing".* Nilai juga merupakan suatu konsep atau prinsip moral. Secara estetik prinsip moral tidaklah relevan. Ketika diperkenalkan sebagai faktor kritik dan produk artistik, sebuah karya seni pasti merupakan sesuatu yang memiskinkan nilai dan secara estetis pula dapat bersifat merusak. Ketika moral dipahami secara estetis, maka kebenaran dan keharusan tidak nampak secara bersamaan, dan

moral menjadi sebuah materi rasa dan gaya saja. Phenix (1964: 219)

menyatakan:

Moral principles are esthetically irrelevant, and when they are introduced as factors in artistic production and criticism, the works of art are inevitably impoverished and esthetically corrupted. On the other hand, when morals are assimilated to esthetics, right and obligation disappear altogether, and morals become a matter of taste and style.

G. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menjadi masukan yang sangat berharga bagi peningkatan kemampuan guru, orangtua siswa dan perangkat pendidikan lain dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti.
2. Memberikan suatu gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan pendidikan budi pekerti yang dianggap efektif dan efisien dalam menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

H. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini mencakup: 1 Kepala Sekolah, 2 Wakil Kepala Sekolah, 1 Ketua Dewan Sekolah dan 15 anggotanya, 1073 siswa kelas I s/d III, 1048 orangtua siswa, 52 guru, 10 karyawan Tata Usaha, dan semua berjumlah 2200 orang.

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Ketepatan penentuan metode ini didasarkan pada pendapat Winarno Surachmad (1982: 139)

bahwa *“aplikasi metode ini dimaksudkan untuk penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.”*

Metode di atas disertai dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena data dari penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia dalam situasi pendidikan budi pekerti, khususnya di sekolah, sehingga datanya bersifat lunak, artinya penuh pecanderaan atau penghayatan dan penafsiran. Data tersebut dalam kehidupan merupakan data situasi berwujud adegan yang wajar, karena data itu diperolehnya secara wajar. S. Nasution (1988: 9) menyebutnya natural setting. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan, wawancara secara langsung dengan obyek penelitian. Peneliti juga mengamati situasi dan interaksi antara guru, orangtua, dan perangkat pendidikan lain dalam upaya mencapai keberhasilan pendidikan budi pekerti di sekolah.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan dalam penelitian ini secara sistematis mencakup:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Asumsi, Definisi dan Penjelasan Variabel, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Profil Lokasi Penelitian.

Bab II: Hubungan Pendidikan Umum dan Pendidikan Budi Pekerti, yang terdiri dari: Pendidikan Umum, Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah, Pendidikan Budi Pekerti dalam Pendidikan Umum, Faktor Dominan untuk Menciptakan Suasana Sekolah yang Kondusif bagi Pembudayaan Budi Pekerti, dan Peran Guru, Orangtua Siswa dan Perangkat Pendidikan Lain pada Keberhasilan Pendidikan Budi Pekerti.

Bab III: Prosedur Penelitian, yang terdiri dari: Pendekatan dan Metode Penelitian, Sampel dan Subyek Penelitian, Instrumen Penelitian, Tahap-Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Pengolahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian, yang mencakup: Gambaran Umum Data Penelitian, Deskripsi, Interpretasi dan Pembahasan, dan Temuan Penelitian.

Bab V: Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi.

K. Profil Lokasi Penelitian

SLTP Negeri 5 Tasikmalaya didirikan Tahun 1979 merupakan integrasi dari SMEP Tasikmalaya, SLTP Negeri 5 Tasikmalaya menempati dua lokasi, yaitu di Jalan R.E. Martadinata No. 85 Tasikmalaya dan di Kudang Uyah (Belakang Pusat Kerajinan Kusumah Tasikmalaya). Kedua lokasi tersebut berjarak sekitar 400 m dengan luas tanah keseluruhannya 6240,19 m² dan yang dijadikan bangunan 2740,19 m², terdiri dari ruang belajar 14 ruangan, ruang laboratorium, perpustakaan, 3 ruangan guru, BP, OSIS, Mushola, UKS, dapur, penjaga, koperasi, rumah tinggal, ruang nginap kepala sekolah dan MCK 1 unit, podium, lapangan olahraga 1 halaman (Basket) dan Volley Ball 1 halaman.

Keadaan situasi lingkungan di SLTP Negeri 5 dan dijadikan sebagai salah satu SLTP dari 48 sekolah di seluruh Indonesia, yaitu 24 SD, 16 SLTP, dan 8 SMU, yang diujicobakan Program Pendidikan IMTAQ dan Pendidikan Budi Pekerti, dilihat dari segi fisiknya tercermin dari hasil karya siswa-siswi berupa lukisan kaligrafi ukuran 40 x 150 cm, dipajang di setiap dinding luar kelas, bagi ibu guru dan para siswanya diwajibkan berpakaian busana Muslim. Saat ini SLTP Negeri 5 sedang membangun sebuah mushola baru permanen berlantai dua

dengan dana swadaya guru, siswa dan orangtua. Keadaan tersebut sesuai dengan visi dan misi SLTPN 5, yaitu unggul dan tertinggi dalam prestasi, teratas dalam kualitas, didasari IMTAQ, keteladanan dan profesional, guna mendidik generasi cageur, bageur, bener, singer, pinter, jujur, beunghar tur sholeh.

Meskipun demikian, SLTPN 5 pada tahun ajaran 2002/2003 ada 3 siswa/siswi non-Muslim. Pelaksanaan proses belajar mengajar dilaksanakan pagi dan sore. SLTPN 5 di kampus Martadinata paginya kelas 2 A, B, C, dan kelas 3, siangnya kelas 1, sedangkan di kampus Kudanguyah kelas 2 D, E, F, G, H. Setiap libur ramadhan diadakan pesantren kilat.

Untuk memperoleh gambaran siswa SLTP Negeri 5 Tasikmalaya dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

TABEL 1
KEADAAN SISWA SLTP NEGERI 5 TASIKMALAYA
TAHUN AJARAN 2002/2003

NO	KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH SISWA	JUMLAH KELAS
		L	P		
1	I	176	184	360	9
2	II	155	193	348	9
3	III	174	191	365	8
J U M L A H		505	568	1073	26

Untuk memperoleh gambaran keadaan guru SLTPN 5 Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 2:

TABEL 2
KEADAAN GURU SLTP NEGERI 5 TASIKMALAYA
TAHUN AJARAN 2002/2003

NO	JENIS KELAMIN		LULUSAN					JUMLAH	BID. ILMU/JURUSAN PENDIDIKAN
	L	P	S1	D3	D2	D1	PGSLTP		
1	15	11	26					26	FKIP/IKIP/IAIN
2				15				15	MGMP/LKG/SPGK
3					6			6	PKG/MGMP
4						3		3	MGMP
5							2	2	MGMP
								52	

Dengan memperhatikan tabel 1 dan 2. diatas diperoleh gambaran rasio perbandingan antara guru dengan siswa hampir 1 : 20. Ini membuktikan bahwa sekolah tersebut sudah memiliki cukup guru. Penyebaran keahlian guru pun cukup merata, bahkan 50% gurunya sudah sarjana S-1 bidang kependidikan, hal ini membuktikan dari segi kualitas dan kuantitas sudah cukup memadai.

Kini SLTP Negeri 5 Tasikmalaya dipimpin oleh Kepala Sekolah yang bernama Drs. H. Dadang Y, SH. Di bawah kepemimpinannya kegiatan-kegiatan dan program-program sekolah yang mendukung program IMTAQ dan pendidikan budi pekerti terus dikembangkan dan diterapkan, sehingga SLTP Negeri 5 Tasikmalaya dijadikan salah satu dari 6 sekolah yang dijadikan sekolah ujicoba SLTP Pilot Proyek Pendidikan Budi Pekerti dan Imtaq di Jawa Barat.

Adapun denah sekolah SLTP ini di Desa Cipedes d/a Jl. Martadinata Tasikmalaya ialah sebagaimana terlampir.